



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024



DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN LAMONGAN

Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 63 Lamongan
Kode Pos 62214 Telp (0322) 316147
E-mail: disnaker@lamongankab.go.id
Website: www.lamongankab.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan dapat diselesaikan dengan baik.

RENJA PD Tahun 2024 ini digunakan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun, dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan.

RENJA PD Tahun 2024 ini memuat Program dan Kegiatan yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan tugas ke depan dengan mengantisipasi perkembangan mendatang. Kami menyadari bahwa penyusunan RENJA PD Tahun 2024 ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik, saran dan masukan dari semua pihak guna perbaikan dan penyempurnaan penyusunan RENJA PD Tahun 2024.

Sekian dan terima kasih.

Lamongan, 4 Agustus 2023



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	3
1.4 SISTIMATIKA PENULISAN.....	3
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	5
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD.....	5
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD.....	24
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD.....	26
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD.....	27
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.....	39
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	40
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI.....	40
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD.....	42
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN.....	44
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	48
BAB V PENUTUP.....	60
5.1 KAIDAH – KAIDAH PELAKSANAAN.....	60
5.2 RENCANA TINDAK LANJUT.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan. Renja memiliki kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD), dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu:

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. penetapan.

Selanjutnya Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan idil dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Tahun 2024 adalah Pancasila dan landasan konstitusional adalah UUD 1945, sedangkan landasan operasional adalah meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan Kabupaten Lamongan diantaranya :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421).
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
 12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026
 13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026
 14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 76 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kabupaten Lamongan
 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2024.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Awal (Renja Ranwal PD) dimaksudkan agar Pola Pembangunan yang akan dilakukan oleh sebuah instansi dapat dijalankan secara sistematis, teratur, terarah dan berkelanjutan dengan memperhatikan faktor-faktor penghambat dan pendukung sehingga dampak yang akan terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisir dan diantisipasi.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Rancangan Awal (Renja Ranwal PD) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan Visi, Misi Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lamongan.
- 2) Menetapkan Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan dalam satu tahun sebagaimana diuraikan dalam RENSTRA PD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan, yang menjadi Pedoman Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan pembangunan lima tahun ke depan sehingga hasilnya dapat dicapai dan diukur secara komprehensif dan obyektif.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
 - 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
 - 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
 - 3.3 Program dan Kegiatan
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V PENUTUP
 - 5.1 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan
 - 5.2 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Tahun 2022 dilaksanakan untuk :

1. Mengetahui realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Mengetahui realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Mengetahui realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui:
 - a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi terget kinerja program/kegiatan;
 - b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra Perangkat Daerah;
 - c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu di ambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan pada dasarnya menyajikan pegukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan selama Tahun 2022 dan perkiraan target Tahun 2023.

Pada Tahun 2022 total anggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 9.054.343.734 dengan rincian belanja langsung sebesar Rp. 4.830.658.407 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.223.685.327 yang di alokasikan untuk pelaksanaan 6 (enam) program, 19 (sembilan belas) kegiatan dan 40 (empat puluh) sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 8.535.509.727 dengan rincian belanja langsung Rp 3.919.905.467 dan belanja tidak langsung sebesar Rp 4.615.604.260 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 94,27%.

Sedangkan untuk pencapaian kinerja pada tahun berjalan yaitu Tahun 2023 kami perkirakan bahwa pelaksanaan bahwa pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatannya akan sesuai dengan target rencana. Pencapaian kinerja Tahun 2023 belum dikaitkan dengan pencapaian target pencapaian kinerja tahunan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Periode 2021-2026, dikarenakan Rencana Kerja 2023 masih dalam tahun berjalan.

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan pencapaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel T-C.29
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
 Dinas Tenaga Kerja
 Kabupaten Lamongan

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023 Tahun Berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD S/D Dengan Tahun 2023 (Tahun Berjalan/n-1)	
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian %
1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= 5+7+9 *	11= 10/4 *
2	07	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Internal Disnaker	83	-	79	87,25	110,44	80	80	-
2	07	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen RKPD	-	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	-	4 dokumen	
				Jumlah dokumen RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah	-	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	-	6 dokumen	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja (CAPKIN, IKI dan SAKIP)	-	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	-	24 dokumen	
2	07	01	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Informasi dan Profil Ketenagakerjaan Kabupaten Lamongan	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	2 dokumen	
				Jumlah Dokumen (LPPD, LKPJ, LKJIP dan IKM)	-	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	-	8 dokumen	
2	07	01	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	-	35 orang	35 orang	100%	-	35 orang	
2	07	01	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	-	3 dokumen	3 dokumen	100%	-	6 dokumen	

						Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023 Tahun Berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD S/D Dengan Tahun 2023 (Tahun Berjalan/n-1)
1			2		3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= 5+7+9 *	11= 10/4 *	
2	07	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran tepat waktu	-	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	-	6 dokumen	
2	07	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Batik Tradisional	-	-	60 orang	60 orang	100%	-	60 orang	
2	07	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	-	6 orang	6 orang	100%	-	6 orang	
						Jumlah bimtek peningkatan SDM aparatur ketenagakerjaan		-	-	1 Paket	1 Paket	100%	-	1 Paket	
2	07	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	-	17 alat listrik	18 alat listrik	18 alat listrik	100%	-	18 alat listrik	
2	07	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang dibutuhkan	-	47 ATK	27 ATK	27 ATK	100%	-	74 ATK	
2	07	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan	-	5 cetakan	4 cetakan	4 cetakan	100%	-	9 cetakan	
						Jumlah foto copy		-	8.636 lembar	8.636 lembar	8.636 lembar	100%	-	8.636 lembar	
2	07	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	-	2 jenis bahan bacaan	2 jenis bahan bacaan	2 jenis bahan bacaan	100%	-	2 jenis bahan bacaan	
						Jumlah iklan		-	1 iklan	11 kali	11 kali	100%	-	11 kali	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023 Tahun Berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD S/D Dengan Tahun 2023 (Tahun Berjalan/n-1)			
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)					
1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= 5+7+9 *	11= 10/4 *		
2	07	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	-	198 box nasi, 198 box snack, 3 botol besar air mineral, 15 dus air minum sedang, 16 dus air gelas, 19 galon air mineral	248 box nasi, 248 box snack	248 box nasi, 248 box snack	100%	-	446 box nasi, 446 box snack, 3 botol besar air mineral, 15 dus air minum sedang, 16 dus air gelas, 19 galon air mineral
							Jumlah makanan dan minuman tamu yang disediakan	-	-	30 dus air minum sedang, 48 botol minum besar, 60 dus air gelas, 48 galon air mineral	30 dus air minum sedang, 48 botol minum besar, 60 dus air gelas, 48 galon air mineral	100%	-	30 dus air minum sedang, 48 botol minum besar, 60 dus air gelas, 48 galon air mineral
							Jumlah perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	-	8 perjalanan	124 perjalanan	124 perjalanan	100%	-	132 perjalanan
							Jumlah sosialisasi	-	-	3 kali	3 kali	100%	-	3 kali
2	07	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur	-	-	1 meja rapat dan 1 kursi rapat	1 meja rapat dan 1 kursi rapat	100%	-	1 meja rapat dan 1 kursi rapat
2	07	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor	-	-	1 komputer, 1 laptop dan 1 printer	1 komputer, 1 laptop dan 1 printer	100%	-	1 komputer, 1 laptop dan 1 printer
2	07	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	-	3 rekening	4 rekening	4 rekening	100%	-	4 rekening

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023 Tahun Berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD S/D Dengan Tahun 2023 (Tahun Berjalan/n-1)			
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)					
1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= 5+7+9 *	11= 10/4 *		
2	07	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara dengan baik	-	22 Komputer, 28 Printer, 41 AC	16 Komputer, 22 Printer, 25 AC	16 Komputer, 22 Printer, 25 AC	100%	-	38 Komputer, 50 Printer, 66 AC
						Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara dengan baik	-	2 soundsystem, 2 kursi tamu, 8 unit tabung apar	2 soundsystem, 1 kursi tamu, 9 unit tabung apar	2 sound system, 1 kursi tamu, 9 unit tabung apar	100%	-	4 sound system, 3 kursi tamu, 17 unit tabung apar	
2	07	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah cleaning service	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	-	1 Paket
						Jumlah JKK/JKM	-	29 Orang	30 Orang	30 Orang	100%	-	30 Orang	
						Jumlah premi asuransi kesehatan	-	29 Orang	30 Orang	30 Orang	100%	-	30 Orang	
						Jumlah tenaga administrasi perkantoran	-	24 Orang	26 Orang	26 Orang	100%	-	26 Orang	
						Jumlah tenaga keamanan	-	5 Orang	4 Orang	4 Orang	100%	-	4 Orang	
2	07	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	-	1 unit kendaraan roda 4	2 unit kendaraan roda 4	2 unit kendaraan roda 4	100%	-	2 unit kendaraan roda 4
						Jumlah pajak surat kendaraan yang terbayarkan	-	2 unit kendaraan roda 2	1 kir, 5 unit kendaraan roda 4 dan 10 unit kendaraan roda 2	5 unit kendaraan roda 4 dan 10 unit kendaraan roda 2	93,75%	-	5 unit kendaraan roda 4 dan 10 unit kendaraan roda 2	

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023 Tahun Berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD S/D Dengan Tahun 2023 (Tahun Berjalan/n-1)					
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian %				
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= 5+7+9 *	11= 10/4 *				
2	07	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	-	2 unit kendaraan roda 4	4 unit kendaraan roda 4, 10 unit kendaraan roda 2	4 unit kendaraan roda 4, 10 unit kendaraan roda 2	100%	-	4 unit kendaraan roda 4, 10 unit kendaraan roda 2	
2	07	01	2	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	-	3 gedung	1 paket	1 paket	100%	-	1 paket	
						Jumlah gedung kantor yang dibangun	-	-	1 paket	1 paket	100%	-	1 paket		
2	07	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen, perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	110 dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	100%	8 dokumen	52 dokumen	47,27%
2	07	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	4 dokumen	4 dokumen	-
2	07	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	-	-	-	-	-	4 laporan	4 laporan	-
2	07	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	07	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	-	33 orang	33 orang	-
2	07	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	-	-	-	-	-	3 laporan	3 laporan	-

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023 Tahun Berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD S/D Dengan Tahun 2023 (Tahun Berjalan/n-1)				
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian %			
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= 5+7+9 *	11= 10/4 *			
2	07	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/sementeran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/sementeran SKPD	-	-	-	-	3 laporan	3 laporan	-
2	07	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
2	07	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	-	-	-	16 orang	16 orang	-
2	07	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	25 orang	25 orang	-
2	07	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
2	07	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	-	-	-	-	18 paket	18 paket	-
2	07	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	-	-	-	-	27 paket	27 paket	-
2	07	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	-	-	-	-	5 paket	5 paket	-
2	07	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	-	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	-

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023 Tahun Berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD S/D Dengan Tahun 2023 (Tahun Berjalan/n-1)		
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian %	
1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= 5+7+9 *	11= 10/4 *	
2	07	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	-	-	-	80 laporan	80 laporan	-
2	07	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	07	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	-	-	-	10 unit	10 unit	-
2	07	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	-	-	-	4 unit	4 unit	-
2	07	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	07	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	-	-	-	3 laporan	3 laporan	-
2	07	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	-	-	75 laporan	75 laporan	-
2	07	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	-	-	-	14 laporan	14 laporan	-
2	07	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023 Tahun Berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD S/D Dengan Tahun 2023 (Tahun Berjalan/n-1)	
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian %
1			2		3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= 5+7+9 *	11= 10/4 *	
2	07	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	-	-	-	-	2 unit	2 unit	-	
2	07	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya	-	-	-	-	14 unit	14 unit	-	
2	07	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	-	-	-	3 unit	3 unit	-	
2	07	02				Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Akurasi Proyeksi Indikator dalam Rencana Tenaga Kerja	88,90%	-	88,86%	89,90%	101,17%	88,87%	88,87%	-
2	07	02	2	01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	-
2	07	02	2	01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah perusahaan yang menyusun RTK Mikro	-	-	-	-	-	25 perusahaan	25 perusahaan	-
2	07	02	2	01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah penyusunan Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	1 dokumen	-
2	07	03				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1,39%	-	1,35%	2,29%	169,63%	1,36%	1,36%	-
						Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja		48,372%	-	42,98%	44,17%	102,77%	44,267%	44,267%	-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023 Tahun Berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD S/D Dengan Tahun 2023 (Tahun Berjalan/n-1)	
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian %
1			2		3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= 5+7+9 *	11= 10/4 *	
2	07	03	2	01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan berdasarkan unit kompetensi	224 orang	96 orang	224 orang	308 orang	137,50%	160 orang	564 orang	-
2	07	03	2	01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	-	96 orang	-	-	-	208 orang	304 orang	-
2	07	03	2	01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi (Menjahit, Tata Rias, Proccesing, Servis sepeda motor, mekanik mobil bensin/diesel, Teknik pendingin/AC dan Las listrik)	-	-	224 orang	288 orang	128,57%	-	288 orang	-
							Jumlah lulusan pelatihan operator alat berat (excavator dan forklift)	-	-	20 orang	20 orang	100%	-	20 orang	-
2	07	03	2	01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada Tahun n	-	-	-	-	-	1 Lembaga	1 Lembaga	-
2	07	03	2	01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan bersertifikat kompetensi	-	-	1 orang	1 orang	100%	-	1 orang	-

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023 Tahun Berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD S/D Dengan Tahun 2023 (Tahun Berjalan/n-1)					
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian %				
1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= 5+7+9 * 11= 10/4 *				
2	07	03	2	01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/ Kota	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	-	-	-	1 unit	1 unit	-		
2	07	03	2	01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/ Kota	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pelatihan (1 scanner dan 2 printer)	-	-	3 buah	3 buah	100%	-		
2	07	03	2	02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang memiliki perizinan	45 LPK	-	-	64 Lembaga	64 Lembaga	-		
2	07	03	2	02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang terakredetasi	-	-	45 LPK	1 LPK	2,22%	-		
2	07	03	2	02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	-	-	-	64 Lembaga	64 Lembaga	-		
2	07	03	2	02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang memiliki perizinan	-	-	50 LPK	50 LPK	100%	-		
2	07	03	2	04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah produktivitas SDM perusahaan yang meningkat	10 orang	-	10 orang	10 orang	100%	10 Perusahaan		
2	07	03	2	04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	-	-	10 orang	10 orang	100%	10 Perusahaan	10 Perusahaan	-
2	07	03	2	05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktifitas	7 perusahaan kecil	-	7 perusahaan kecil	7 perusahaan kecil	100%	16 perusahaan kecil	23 perusahaan kecil	-
2	07	03	2	05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	-	-	-	-	-	16 perusahaan kecil	16 perusahaan kecil	-

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023 Tahun Berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD S/D Dengan Tahun 2023 (Tahun Berjalan/n-1)					
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)							
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= 5+7+9 * 11= 10/4 *					
2	07	03	2	05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah kompetensi produktifitas tenaga kerja	-	-	7 perusahaan kecil	7 perusahaan kecil	100%	-	7 perusahaan kecil	
2	07	04				Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota	76,08%	-	72,30%	73,25%	101,31%	73,21%	73,21%	-
2	07	04	2	01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan Antarkerja	2 pelayanan	-	2 pelayanan	2 pelayanan	100%	1 Pelayanan	2 Pelayanan	-
2	07	04	2	01	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	-	-	-	-	-	75 Orang	75 Orang	-
2	07	04	2	01	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	-	-	100 orang	2.713 orang	2.713 %	-	2.713 orang	
2	07	04	2	01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD	-	-	-	-	-	15 Orang	15 Orang	
2	07	04	2	01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	-	-	-	-	-	20 orang	20 orang	-
2	07	04	2	01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah calon Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang dilatih	-	-	20 orang	20 orang	100%	-	20 orang	
2	07	04	2	03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan informasi pasar kerja	1.000 pencaker	500 pencaker	1.000 pencaker	3.704 pencaker	370,40%	1.000 pencaker	5.204 pencaker	-
2	07	04	2	03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	-	-	-	-	-	2 paket	2 paket	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023 Tahun Berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD S/D Dengan Tahun 2023 (Tahun Berjalan/n-1)			
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)					
1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= 5+7+9 *	11= 10/4 *		
2	07	04	2	03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	-	-	-	-	40 BKK		
2	07	04	2	03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah analisis pasar kerja mikro	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	
							Jumlah media promosi informasi pasar kerja	-	1.000 Posterleaflet	2.000 Leaflet, pamphlet	2.000 Leaflet, pamphlet	100%	-	
							Jumlah peserta pembinaan bursa kerja khusus	-	-	15 Orang	15 Orang	100%	-	
							Jumlah peserta sosialisasi informasi pasar kerja	-	-	15 Orang	15 Orang	100%	-	
2	07	04	2	03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja	-	-	-	-	-	1.000 orang	
2	07	04	2	03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja bertemu dengan pemberi kerja sesuai dengan pendidikan dan keahliannya / Bursa Kerja (JMF) secara online/offline	-	500 pencaker	1.000 pencaker	3.704 pencaker	370,40%	-	4.204 pencaker
							Jumlah dokumen database pengangguran	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	
2	07	04	2	04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI dan PMI Purna yang dilindungi	110 orang	-	110 orang	772 orang	701,82%	99 orang	871 orang

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023 Tahun Berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD S/D Dengan Tahun 2023 (Tahun Berjalan/n-1)	
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian %
1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= 5+7+9 *	11= 10/4 *			
2	07	04	2	04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	-	-	-	-	-	35 orang	35 orang	-
2	07	04	2	04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	-	25 orang	20 orang	20 orang	100%	-	45 orang	
							Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	-	40 orang	735 orang	1.837,5%	-	735 orang		
							Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepuungan	-	8 orang	17 orang	212,50%	-	17 orang		
2	07	04	2	04	02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang ditangani	-	-	-	-	-	44 Orang	44 Orang	
2	07	04	2	04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI purna yang diberdayakan	-	-	-	-	-	20 Orang	20 Orang	-
2	07	04	2	04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarga	-	-	20 orang	20 orang	100%	-	20 orang	

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023 Tahun Berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD S/D Dengan Tahun 2023 (Tahun Berjalan/n-1)		
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian %	
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= 5+7+9 *	11= 10/4 *	
2	07	04	2	05	Jumlah penerbitan perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50 orang	29 orang	50 Orang	50 Orang	129 Orang	-	
2	07	04	2	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi perusahaan yang mempekerjakan TKA	-	-	-	50 Orang	50 Orang	
2	07	04	2	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Perpanjangan IMTA di Kabupaten Lamongan	-	29 orang	50 orang	50 orang	79 orang	
					Jumlah penerbitan raperda retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Lamongan	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	
2	07	05			Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan UU Bidang Ketenagakerjaan	60,11%	-	60,07%	60,19%	100,20%	
2	07	05	2	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang menerapkan UU Bidang Ketenagakerjaan	30 perusahaan	-	30 perusahaan	30 perusahaan	60 perusahaan	-
2	07	05	2	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan pengesahan PP yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP online	-	-	-	30 perusahaan	30 perusahaan	-

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023 Tahun Berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD S/D Dengan Tahun 2023 (Tahun Berjalan/n-1)				
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)						
1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= 5+7+9 *	11= 10/4 *			
2	07	05	2	01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang mendaftarkan PP/PKB dan pembentukan LKS Bipartit	-	10 perusahaan	30 perusahaan	30 perusahaan	100%	-	40 perusahaan	
						Jumlah perusahaan yang mendapatkan pembinaan/penyuluhan kepatuhan syarat-syarat kerja	-	-	50 perusahaan	50 perusahaan	100%	-	50 perusahaan		
2	07	05	2	01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB), Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek	-	-	-	-	-	50 laporan	50 laporan	-
2	07	05	2	01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah kepesertaan BPJS di perusahaan	-	-	30 perusahaan	30 perusahaan	100%	-	30 perusahaan	
						Jumlah peserta pembahasan UMK	-	-	16 orang	16 orang	100%	-	16 orang		
						Jumlah peserta sosialisasi UMK	-	-	50 orang	50 orang	100%	-	50 orang		
2	07	05	2	02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian perselisihan kerja	10 perselisihan	10 perselisihan	10 perselisihan	6 perselisihan	60%	10 perselisihan kerja	26 perselisihan kerja	-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023 Tahun Berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD S/D Dengan Tahun 2023 (Tahun Berjalan/n-1)		
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)				
1			2		3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= 5+7+9 *	11= 10/4 *		
2	07	05	2	02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah	-	-	-	-	-	2 Perkara	2 Perkara	-	
2	07	05	2	02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian perselisihan hubungan industrial	-	10 perselisihan	10 perselisihan	6 perselisihan	60%	-	16 perselisihan		
							Jumlah peserta sosialisasi UU perselisihan/PPHI	-	-	50 orang	50 orang	100%	-	50 orang		
2	07	05	2	02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	-	-	-	-	-	1 lembaga	1 lembaga	-	
2	07	05	2	02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Monitoring LKS-Tripartit	-	-	18 kali	18 kali	100%	-	18 kali		
							Jumlah pelaksanaan peringatan hari buruh/May Day	-	-	1 kali	1 kali	100%	-	1 kali		
3	32	03				Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya	64,76%	-	64,72%	64,41%	99,52%	64,73%	64,73%	-	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023 Tahun Berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD S/D Dengan Tahun 2023 (Tahun Berjalan/n-1)			
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian %		
1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= 5+7+9 *	11= 10/4 *		
3	32	03	2	01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah calon transmigran yang ditempatkan	10 KK	-	10 KK	-	5 KK	5 KK	
3	32	03	2	01	04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan	-	-	-	-	5 KK	5 KK	
3	32	03	2	01	04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah calon transmigran yang diberangkatkan	-	-	5 KK	-	-	-	
						Jumlah kunjungan kerjasama antar daerah penempatan transmigrasi	-	-	1 lokasi	1 lokasi	100%	-	1 lokasi	
3	32	03	2	01	05	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah calon transmigran yang mendapatkan penyuluhan	-	-	-	-	20 Orang	20 Orang	-
3	32	03	2	01	05	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi/ penyuluhan tentang transmigrasi	-	-	20 orang	20 orang	100%	-	20 orang

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD
Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Lamongan

No	INDIKATOR KINERJA	SPM/ Standar Nasional	IKK PP-6/08	TARGET RENSTRA OPD				Realisasi Capaian (%)		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Presentasi Akurasi Proyeksi Indikator Dalam Rencana Tenaga Kerja			88,86%	88,87%	88,88%	88,89%	89,90%	88,87%	88,88%	88,89%	
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi			1,35%	1,36%	1,37%	1,38%	2,29%	1,36%	1,37%	1,38%	
3	Persentase Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja			42,978%	44,267%	45,595%	46,963%	44,17%	44,267%	45,595%	46,963%	
4	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten			72,30%	73,21%	74,05%	75,05%	73,25%	73,21%	74,05%	75,05%	
5	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan UU Bidang Ketenagakerjaan			60,07%	60,08%	60,09%	60,10%	60,19%	60,08%	60,09%	60,10%	
6	Persentase Transmigran Yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya			64,72%	64,73%	64,74%	64,75%	64,41%	64,73%	64,74%	64,75%	
7	Indeks Kepuasan Masyarakat			79	80	81	82	87,25	80	81	82	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola dengan baik, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Dalam menentukan isu-isu strategis, perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang didasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sehingga dapat dipisahkan permasalahan yang dapat dikendalikan oleh Perangkat Daerah sendiri dan permasalahan permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh Perangkat Daerah karena keterbatasan kewenangannya, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi dan Renstra Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur dan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD. Dari hasil analisis dan telaahan tersebut diatas, identifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah. Kemudian faktor penghambat dan faktor pendorong tersebut diambil untuk dikelompokkan yang sejenis untuk dirumuskan menjadi isu strategis.

Berdasarkan di atas, maka dapat disimpulkan isu-isu strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas tenaga kerja;
2. Belum tersedianya tenaga kerja sesuai kualifikasi sehingga masih banyak yang belum diterima di pasar kerja;
3. Ketersediaan informasi pasar kerja belum optimal;
4. Pemberangkatan calon transmigran tidak optimal/sering tertunda keberangkatannya dan terbatasnya alokasi;
5. Banyaknya warga Lamongan yang menjadi PMI dan mendapat masalah di Negara tempat bekerjanya;
6. Masih terbatasnya pelaksanaan uji kompetensi bagi tenaga kerja/angkatan kerja;
7. Tingginya konflik ketenagakerjaan dalam penentuan UMK dan masih rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja;
8. Perlindungan tenaga kerja melalui Program BPJS Ketenagakerjaan belum optimal.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan.

Disamping itu juga, dokumen Rencana Kerja (Renja) yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan.

Program dan Kegiatan Tahun 2024 yang telah disusun oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan merupakan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan Tahun 2024 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan. Berikut merupakan tabel penjelasannya.

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
KABUPATEN LAMONGAN

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Tenaga Kerja	Nilai IKM Internal DISNAKER	81	6.517.962.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Tenaga Kerja	Nilai IKM Internal DISNAKER	81	6.517.962.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah dokumen, perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	14 Dokumen	170.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah dokumen, perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	14 Dokumen	170.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	40.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	40.000.000	
	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	20.000.000	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	20.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 laporan	40.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 laporan	40.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 laporan	70.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 laporan	70.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja	Persentase Administrasi Keuangan Daerah	100%	4.127.249.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja	Persentase Administrasi Keuangan Daerah	100%	4.127.249.000	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	4.107.249.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	4.107.249.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	3 laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	3 laporan	10.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	3 laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	3 laporan	10.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja	Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	103.220.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja	Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	103.220.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	60 paket	50.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	60 paket	50.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	29 Orang	28.220.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	29 Orang	28.220.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	25.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	25.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja	Persentase administrasi umum perangkat daerah	100%	432.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja	Persentase administrasi umum perangkat daerah	100%	432.000.000	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	18 paket	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	18 paket	10.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	27 paket	25.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	27 paket	25.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 paket	10.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 paket	10.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 dokumen	25.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 dokumen	25.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	80 laporan	362.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	80 laporan	362.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Tenaga Kerja	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	260.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Tenaga Kerja	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	260.000.000	
	Pengadaan Mebel	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah paket mebel yang disediakan	10 unit	100.000.000	Pengadaan Mebel	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah paket mebel yang disediakan	10 unit	100.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 unit	160.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 unit	160.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Tenaga Kerja	Persentase penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	100%	1.160.493.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Tenaga Kerja	Persentase penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	100%	1.160.493.000	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 laporan	297.729.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 laporan	297.729.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	75 laporan	30.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	75 laporan	30.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	14 laporan	832.764.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	14 laporan	832.764.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Tenaga Kerja	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	265.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Tenaga Kerja	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	265.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 unit	50.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 unit	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya	14 unit	50.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya	14 unit	50.000.000	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	165.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	165.000.000	
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	Percentasi akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	88,88%	25.000.000	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	Percentasi akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	88,88%	25.000.000	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Penyusunan dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)	1 dokumen	25.000.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Penyusunan dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)	1 dokumen	25.000.000	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah perusahaan yang menyusun RTK Mikro	25 Perusahaan	25.000.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah perusahaan yang menyusun RTK Mikro	25 Perusahaan	25.000.000	
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Lamongan	Percentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1,37%	2.150.000.000	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Lamongan	Percentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1,37%	2.150.000.000	
			Percentase Tingkat produktifitas tenaga kerja	45,595%				Percentase Tingkat produktifitas tenaga kerja	45,595%		
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kab. Lamongan	Jumlah lulusan pelatihan yang bersertifikat kompetensi	160 orang	1.950.000.000	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kab. Lamongan	Jumlah lulusan pelatihan yang bersertifikat kompetensi	160 orang	1.950.000.000	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Lamongan	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	208 orang	1.900.000.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Lamongan	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	208 orang	1.900.000.000	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Lamongan	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada Tahun n	1 Lembaga	25.000.000	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Lamongan	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada Tahun n	1 Lembaga	25.000.000	
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	1 unit	25.000.000	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	1 unit	25.000.000	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Lamongan	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang terakredetasi	45 LPK	50.000.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Lamongan	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang terakredetasi	45 LPK	50.000.000	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Lamongan	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	64 Lembaga	50.000.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Lamongan	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	64 Lembaga	50.000.000	
	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kab. Lamongan	Jumlah produktivitas SDM perusahaan yang meningkat	10 Perusahaan	75.000.000	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kab. Lamongan	Jumlah produktivitas SDM perusahaan yang meningkat	10 Perusahaan	75.000.000	
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kab. Lamongan	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	10 Perusahaan	75.000.000	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kab. Lamongan	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	10 Perusahaan	75.000.000	
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktifitas	16 perusahaan kecil	75.000.000	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktifitas	16 perusahaan kecil	75.000.000	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Lamongan	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	6 Dokumen	75.000.000	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Lamongan	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	6 Dokumen	75.000.000	
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Kab. Lamongan	Percentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	74,05%	865.000.000	Program Penempatan Tenaga Kerja	Kab. Lamongan	Percentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	74,05%	865.000.000	
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah pelayanan antar kerja	2 Pelayanan	135.000.000	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah pelayanan antar kerja	2 Pelayanan	135.000.000	
	Pelayanan antar Kerja	Kab. Lamongan	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	75 orang	95.000.000	Pelayanan antar Kerja	Kab. Lamongan	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	75 orang	95.000.000	
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kab. Lamongan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD	15 Orang	20.000.000	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kab. Lamongan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD	15 Orang	20.000.000	
	Perluasan kesempatan kerja	Kab. Lamongan	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	20 orang	20.000.000	Perluasan kesempatan kerja	Kab. Lamongan	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	20 orang	20.000.000	
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kab. Lamongan	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan informasi pasar kerja	1.000 Pencaker	450.000.000	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kab. Lamongan	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan informasi pasar kerja	1.000 Pencaker	450.000.000	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Lamongan	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	100.000.000	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Lamongan	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	100.000.000	
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Lamongan	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	40 Orang	50.000.000	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Lamongan	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	40 Orang	50.000.000	
	Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Lamongan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja	2.000 orang	300.000.000	Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Lamongan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja	2.000 orang	300.000.000	
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah CPMI dan PMI Purna yang dilindungi	99 Orang	260.000.000	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah CPMI dan PMI Purna yang dilindungi	99 Orang	260.000.000	
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kab. Lamongan	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	500 orang	200.000.000	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kab. Lamongan	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	500 orang	200.000.000	
	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Kab. Lamongan	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang ditangani	44 orang	30.000.000	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Kab. Lamongan	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang ditangani	44 orang	30.000.000	
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kab. Lamongan	Jumlah PMI purna yang diberdayakan	20 Orang	30.000.000	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kab. Lamongan	Jumlah PMI purna yang diberdayakan	20 Orang	30.000.000	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah penerbitan perpanjangan IMTA di Kabupaten Lamongan	50 Orang	20.000.000	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah penerbitan perpanjangan IMTA di Kabupaten Lamongan	50 Orang	20.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah peserta sosialisasi perusahaan yang mempekerjakan TKA	50 Orang	20.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah peserta sosialisasi perusahaan yang mempekerjakan TKA	50 Orang	20.000.000	
	Program Hubungan Industrial	Kab. Lamongan	Persentase perusahaan yang menerapkan UU bidang ketenagakerjaan	60,09%	450.000.000	Program Hubungan Industrial	Kab. Lamongan	Persentase perusahaan yang menerapkan UU bidang ketenagakerjaan	60,09%	450.000.000	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perusahaan yang menerapkan UU bidang ketenagakerjaan	30 perusahaan	60.000.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perusahaan yang menerapkan UU bidang ketenagakerjaan	30 perusahaan	60.000.000	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab. Lamongan	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan pengesahan PP yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP online	30 Perusahaan	20.000.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab. Lamongan	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan pengesahan PP yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP online	30 Perusahaan	20.000.000	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Lamongan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB), Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek	50 Laporan	40.000.000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Lamongan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB), Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek	50 Laporan	40.000.000	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah penyelesaian perselisihan kerja	10 Perselisihan Kerja	390.000.000	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah penyelesaian perselisihan kerja	10 Perselisihan Kerja	390.000.000	
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah Perselisihan yang dicegah	2 Perkara	20.000.000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah Perselisihan yang dicegah	2 Perkara	20.000.000	
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	35 Lembaga	170.000.000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	35 Lembaga	170.000.000	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Jumlah peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	500 Orang	200.000.000	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Jumlah peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	500 Orang	200.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Kab. Lamongan				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Kab. Lamongan				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Kab. Lamongan				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Kab. Lamongan				
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kab. Lamongan	Percentase Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya	64,74%	60.000.000	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kab. Lamongan	Percentase Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya	64,74%	60.000.000	
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah calon transmigran yang ditempatkan	5 KK	60.000.000	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah calon transmigran yang ditempatkan	5 KK	60.000.000	
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan	5 KK	50.000.000	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan	5 KK	50.000.000	
	Penyuluhan Transmigrasi	Kab. Lamongan	Jumlah calon transmigran yang mendapatkan penyuluhan	20 KK	10.000.000	Penyuluhan Transmigrasi	Kab. Lamongan	Jumlah calon transmigran yang mendapatkan penyuluhan	20 KK	10.000.000	
	JUMLAH				10.067.962.000	JUMLAH				10.067.962.000	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari para Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Sekretariat.

Dinas Tenaga Kerja sebagai Perangkat Daerah dengan tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dimana peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini mengkoordinasikan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yang nantinya ditujukan langsung kepada Perangkat Daerah terkait.

Akan tetapi dalam Renja ini tidak ada program/kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat.

Tabel T-C. 32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023 KABUPATEN LAMONGAN

Nama PD : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator/Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL		NIHIL		

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

No	Kebijakan Nasional/ Provinsi	Sumber	Keterangan
Nasional			
1.	Mengubah secara total BLK sebagai Balai Pelatihan Vokasi yang menjadi pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional	Kemennaker	
2.	Membangun Integrasi, pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja dalam sebuah bisnis proses yang utuh dan efektif untuk mempertemukan pencari kerja dengan permintaan pasar kerja	Kemennaker	
3.	Mengembangkan program tenaga kerja mandiri yang efektif untuk membentuk tenaga kerja mandiri dalam rangka memperluas kesempatan kerja yang terukur dan berkelanjutan	Kemennaker	
4.	Mengembangkan pasar kerja luar negeri dengan memperluas negara penempatan Pekerja Migran Indonesia sektor formal dan memasifikasi pengisian jabatan di sektor formal	Kemennaker	
5.	Mengembangkan hubungan industrial yang lebih berkualitas dan adil serta berorientasi pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja secara berkelanjutan	Kemennaker	
Provinsi			
1.	Optimalisasi Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi beserta Uji Sertifikasi Kompetensi	Disnakertrans Provinsi Jawa Timur	
2.	Menyesuaikan jurusan di BLK dengan metode Eliminate, Reduce, Raise dan Create secara bertahap dan berkelanjutan agar bisa sesuai dengan perkembangan Industri maupun perkembangan teknologi industri bukan hanya pada situasi sekarang serta memprediksi perkembangan teknologi di masa depan.	Disnakertrans Provinsi Jawa Timur	

3.	Link and match antara kebutuhan pasar kerja dengan kompetensi angkatan kerja melalui Bursa Kerja Serta Optimalisasi database sektor lapangan usaha yang akan berkembang di daerah wilayah Kabupaten Lamongan Serta data analisa jabatan tentang pekerjaan yang terdestrupsi akibat globalisasi Transformasi digital serta distrupsi di pasar kerja (rev. industri 4.0).	Disnakertrans Provinsi Jawa Timur	
4.	Pengukuran pertumbuhan produktivitas perusahaan menengah dan wirausaha baru	Disnakertrans Provinsi Jawa Timur	
5.	Peningkatan taraf ekonomi transmigran di daerah penempatan dengan cara penambahan skill baru pada waktu pelatihan pra	Disnakertrans Provinsi Jawa Timur	

Strategi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan dalam hal ini merupakan langkah-langkah atau cara-cara yang ditempuh untuk merealisasikan misi pertama (I) Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan untuk “**Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah melalui optimalisasi potensi sektor unggulan daerah**”. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara-cara dan kebijakan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran perencanaan strategis secara efektif dan efisien.

Perencanaan strategis mengagendakan program dan kegiatan pembangunan yang mendukung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan masyarakat dan daya saing melalui upaya peningkatan kinerja birokrasi dan manajemen publik. Strategi pembangunan daerah akan diperjelas melalui serangkaian arah kebijakan.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan disusun secara komprehensif agar dapat mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Oleh karena itu, melalui arah kebijakan dan strategi dapat dijelaskan secara sistematis dan tetap menjadi rujukan dalam setiap jalannya kegiatan pemerintahan selama 5 tahun. Perumusan strategi didasarkan pada kriteria:

- 1) Strategi yang realistik untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
- 2) Menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan;

- 3) Mengevaluasi berbagai faktor internal (kekuatan dan kelemahan), eksternal (peluang dan tantangan) dalam upaya merumuskan strategi yang tepat.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD

Visi RPJMD berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Selain itu, secara politis Visi dapat dimaknai sebagai cita-cita atau harapan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Idealnya visi dapat menjelaskan arah suatu kondisi yang diharapkan dan yang ingin dicapai pada masa depan berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini.

Visi RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan keselarasan dan harmonisasi dengan arah kebijakan RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, RPJPD periode ke 4 Tahun 2005-2025 dan RTRW Tahun 2020-2039 serta mempertimbangkan dinamika pembangunan di Kabupaten Lamongan maka Visi RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 yakni:

“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh *stakeholders* dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. **Terwujudnya**, mengandung arti upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan dalam rangka mencapai kejayaan Lamongan dan keadilan bagi masyarakat.
2. **Kejayaan**, adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai kabupaten yang masyhur, unggul dan maju dalam pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, kebudayaan dan ekonomi berbasis potensi unggulan, sehingga terwujudnya kesejahteraan lahir batin bagi masyarakat.
3. **Berkeadilan** adalah suatu kondisi Lamongan yang semakin merata pelaksanaan pembangunannya dan konektivitas pelayanan publik serta meningkat aksesibilitasnya. Berkeadilan juga bermakna keberpihakan dan kehadiran pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan pendapat masyarakat, sehingga dapat menurunkan kondisi ketimpangan dan kemiskinan.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2021-2026, “**Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan**” ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut.

Misi 1

Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah

Misi 2

Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing dan Berakhhlak yang Responsif terhadap Perubahan Zaman

Misi 3

Mewujudkan Infrastruktur handal dan berkeadilan yang Berawasanan Lingkungan

Misi 4

Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat yang Sejahtera Religius Berbudaya, Aktif, dalam Pembangunan, serta Lingkungan yang Aman dan Tentram

Misi 5

Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang dinamis, serta memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Lamongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi ke 5 (lima) dan Tujuan dari RPJMD Kabupaten Lamongan.

Indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Misi 1 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan daerah.
- Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi secara Inklusif melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaan pembangunan dalam bidang Tenaga Kerja mempunyai beberapa program sebagaimana termuat dalam RPJMD diantaranya:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; tolak ukur dan hasil program ini adalah **Nilai IKM Internal Dinas Tenaga Kerja**
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja; tolak ukur dan hasil program ini adalah **Persentasi akurasi proyeksi indikator dalam Rencana Tenaga Kerja**
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja; tolak ukur dan hasil program ini adalah **Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi, Persentase tingkat produktifitas tenaga kerja.**
4. Program Penempatan Tenaga Kerja; tolak ukur dan hasil program ini adalah **Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/kota.**
5. Program Hubungan Industrial; tolak ukur dan hasil program ini adalah **Persentase Perusahaan yang menerapkan UU bidang Ketenagakerjaan.**
6. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi; tolak ukur dan hasil program ini adalah **Persentase Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya.**

Disamping berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra 2021-2026) dalam pelaksanaan program dan kegiatan juga berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sehubungan dengan hal tersebut maka pada Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan merencanakan 6 (enam) Program yang berkaitan dengan bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
4. Program Penempatan Tenaga Kerja
5. Program Hubungan Industrial
6. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Dari Program tersebut diimplikasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2. Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.1.4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.3.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 1.3.3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.4.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.4.3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 1.4.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.4.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.5.1. Pengadaan Mebel
 - 1.5.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.7.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1.1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
 - 1.1.1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
 3. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - 1.1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - 1.1.1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan klaster kompetensi
 - 1.1.2. Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
 - 1.1.3. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
 - 1.2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - 1.2.1. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - 1.3. Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
 - 1.3.1. Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
 - 1.4. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.4.1. Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
 4. Program Penempatan Tenaga Kerja, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1.1. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1.1. Pelayanan Antar Kerja
 - 1.1.2. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
 - 1.1.3. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
 - 1.1.4. Perluasan Kesempatan Kerja
 - 1.2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - 1.2.1. Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
 - 1.2.2. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
 - 1.2.3. Job Fair/Bursa Kerja

- 1.3. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten/Kota
 - 1.3.1. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)
 - 1.3.2. Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
 - 1.3.3. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna Penempatan
- 1.4. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.4.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Hubungan Industrial, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1.1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1.1. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
 - 1.1.2. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
 - 1.2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.2.1. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.2.2. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.2.3. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja
6. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1.1. Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1.1.1. Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1.1.2. Penyuluhan Transmigrasi

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Daerah Tahun 2024 pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Lamongan

Nama PD : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan

KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU 2025		
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF	
2	7		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai IKM Internal DISNAKER	Dinas Tenaga Kerja	81	5.845.946.790			82	7.169.758.200	
2	07	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen, perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja	22 Dokumen	110.000.000		14 Dokumen	187.000.000	
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja	4 dokumen	40.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 dokumen	44.000.000
2	07	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Tenaga Kerja	2 dokumen	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 dokumen	22.000.000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU 2025	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Tenaga Kerja	4 laporan	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4 laporan	44.000.000
2	07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dinas Tenaga Kerja	4 laporan	70.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4 laporan	77.000.000
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Daerah	Dinas Tenaga Kerja	100%	4.127.249.000			100%	4.539.973.900
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Tenaga Kerja	29 Orang/bulan	4.107.249.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		29 Orang/bulan	4.517.973.900
2	07	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Dinas Tenaga Kerja	3 laporan	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3 laporan	11.000.000
2	07	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD	Dinas Tenaga Kerja	3 laporan	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3 laporan	11.000.000
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaihan Perangkat Daerah	Persentase administrasi Kepegawaihan Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja	100%	103.220.000			100%	113.542.000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU 2025	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
2	07	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Dinas Tenaga Kerja	60 Paket	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		60 Paket	55.000.000
2	07	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Dinas Tenaga Kerja	29 Orang	28.220.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		29 Orang	31.042.000
2	07	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan Perundang-Undangan	Dinas Tenaga Kerja	25 Orang	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		25 Orang	27.500.000
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Dinas Tenaga Kerja	100%	130.000.000			100%	475.200.000
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Dinas Tenaga Kerja	18 paket	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		18 paket	11.000.000
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Dinas Tenaga Kerja	27 paket	25.000.000	Dana Insentif Daerah		27 paket	27.500.000
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Dinas Tenaga Kerja	5 paket	10.000.000	Dana Insentif Daerah		5 paket	11.000.000
2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dinas Tenaga Kerja	2 dokumen	15.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 dokumen	27.500.000
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dinas Tenaga Kerja	80 laporan	70.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		80 laporan	398.200.000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU 2025	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Lamongan	100%	260.000.000			100%	286.000.000
2	07	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kab. Lamongan	10 unit	30.000.000	Dana Insentif Daerah		10 unit	110.000.000
2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kab. Lamongan	6 unit	75.000.000	Dana Insentif Daerah		4 unit	176.000.000
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Lamongan	100%	1.150.477.790			100%	1.276.542.300
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kab. Lamongan	3 laporan	298.713.790	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3 laporan	327.501.900
2	07	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Lamongan	75 laporan	30.000.000	Dana Insentif Daerah		75 laporan	33.000.000
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kab. Lamongan	14 laporan	821.764.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		14 laporan	916.040.400
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Lamongan	100%	120.000.000			100%	291.500.000
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kab. Lamongan	2 unit	50.000.000	Dana Insentif Daerah		2 unit	55.000.000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU 2025	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya	Kab. Lamongan	14 unit	20.000.000	Dana Insentif Daerah		14 unit	55.000.000
2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kab. Lamongan	3 unit	50.000.000	Dana Insentif Daerah		3 unit	181.500.000
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	Kab. Lamongan	88,88%	25.000.000			88,89%	27.500.000
2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen evaluasi Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kab. Lamongan	1 dokumen	25.000.000			1 dokumen	27.500.000
2	07	02	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah perusahaan yang menyusun RTK Mikro	Kab. Lamongan	25 Perusahaan	25.000.000	Dana Insentif Daerah		25 Perusahaan	27.500.000
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Kab. Lamongan	1,37%	1.550.000.000			1,38%	2.365.000.000
						Persentase tingkat produktifitas tenaga kerja	Kab. Lamongan	45,595%				46,963%	
2	7	3	2		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah lulusan pelatihan yang bersertifikat kompetensi	Kab. Lamongan	224 orang	1.450.000.000			192 orang	2.145.000.000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU 2025	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	Kab. Lamongan	208 orang	1.400.000.000	DBH CHT, Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		208 orang	2.090.000.000
2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada Tahun n	Kab. Lamongan	1 Lembaga	25.000.000	Dana Insentif Daerah		1 Lembaga	27.500.000
2	07	03	2.01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	Kab. Lamongan	1 unit	25.000.000	Dana Insentif Daerah		1 unit	27.500.000
2	7	3	2		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang terakredetasi	Kab. Lamongan	45 LPK	20.000.000			45 LPK	55.000.000
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	Kab. Lamongan	64 Lembaga	20.000.000	Dana Insentif Daerah		64 Lembaga	55.000.000
2	7	3	2		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah produktivitas SDM perusahaan yang meningkat	Kab. Lamongan	10 orang	30.000.000			10 Perusahaan	82.500.000
2	07	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Kab. Lamongan	10 Perusahaan	30.000.000	Dana Insentif Daerah		10 Perusahaan	82.500.000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU 2025	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktifitas	Kab. Lamongan	7 perusahaan kecil	50.000.000			16 perusahaan kecil	82.500.000
2	07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Kab. Lamongan	6 Dokumen	50.000.000	Dana Insentif Daerah		6 Dokumen	82.500.000
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Percentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Kab. Lamongan	74,05%	545.000.000			75,05%	951.500.000
2	7	4	2		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan antar kerja	Kab. Lamongan	2 Pelayanan	70.000.000			2 Pelayanan	148.500.000
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	Kab. Lamongan	75 Orang	20.000.000	Dana Insentif Daerah		75 Orang	104.500.000
2	07	04	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD	Kab. Lamongan	15 Orang	30.000.000	Dana Insentif Daerah		15 Orang	22.000.000
2	07	04	2.01	05	Perluasan kesempatan kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	Kab. Lamongan	20 orang	20.000.000	Dana Insentif Daerah		20 orang	22.000.000
2	7	4	2		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan informasi pasar kerja	Kab. Lamongan	1.000 pencaker	320.000.000			1.000 pencaker	495.000.000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU 2025	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
2	07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Lamongan	1 Dokumen	20.000.000	Dana Insentif Daerah		1 Dokumen	110.000.000
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Kab. Lamongan	40 orang	50.000.000	Dana Insentif Daerah		1.000 orang	55.000.000
2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja	Kab. Lamongan	2.000 orang	250.000.000	Dana Insentif Daerah		2.000 orang	330.000.000
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI dan PMI Purna yang dilindungi	Kab. Lamongan	110 Orang	155.000.000			99 Orang	286.000.000
2	07	04	2.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	Kab. Lamongan	500 orang	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		500 orang	220.000.000
2	07	04	2.04	02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang ditangani	Kab. Lamongan	44 Orang	25.000.000	Dana Insentif Daerah		44 Orang	33.000.000
2	07	04	2.04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI purna yang diberdayakan	Kab. Lamongan (desa kantong PMI)	20 Orang	80.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		20 Orang	33.000.000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU 2025	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
2	07	04	2.05		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerbitan perpanjangan IMTA di Kabupaten Lamongan	Kab. Lamongan	0	0			50 Orang	22.000.000
2	07	04	2.05	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi perusahaan yang mempekerjakan TKA	Kab. Lamongan	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		50 Orang	22.000.000
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan UU bidang ketenagakerjaan	Kab. Lamongan	60,09%	230.000.000			60,10%	495.000.000
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang menerapkan UU bidang ketenagakerjaan	Kab. Lamongan	30 Perusahaan	60.000.000			30 Perusahaan	66.000.000
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan pengesahan PP yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP online	Kab. Lamongan	30 Perusahaan	20.000.000	Dana Insentif Daerah		30 Perusahaan	22.000.000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU 2025	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB), Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek	Kab. Lamongan	50 Laporan	40.000.000	Dana Insentif Daerah		50 Laporan	44.000.000
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian perselisihan kerja	Kab. Lamongan	10 Perselisihan Kerja	170.000.000			10 Perselisihan Kerja	429.000.000
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah	Kab. Lamongan	2 Perkara	20.000.000	Dana Insentif Daerah		2 Perkara	22.000.000
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	Kab. Lamongan	35 Lembaga	150.000.000	Dana Insentif Daerah		35 Lembaga	187.000.000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU 2025	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
2	07	05	2.02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja	Jumlah peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Lamongan	0	0			500 Orang	220.000.000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								
3	32	3			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya	Kab. Lamongan	64,74%	60.000.000			64,75%	66.000.000
3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah calon transmigran yang ditempatkan	Kab. Lamongan	5 KK	60.000.000			5 KK	66.000.000
3	32	03	2.01	04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan	Kab. Lamongan	5 KK	50.000.000	Dana Insentif Daerah		5 KK	55.000.000
3	32	03	2.01	05	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah calon transmigran yang mendapatkan penyuluhan	Kab. Lamongan	20 KK	10.000.000	Dana Insentif Daerah		20 KK	11.000.000
					JUMLAH			8.255.946.790				11.074.758.200	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasi sebagai wujud nyata dari tanggung jawab Pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan ketenagakerjaan dan transmigrasi yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Output Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan adalah Program Tahunan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan.

5.1 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang mandiri, berdaya saing, harmonis, dan sejahtera. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan Tahun 2024, di dalam pelaksanaanya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

5.2 RENCANA TINDAK LANJUT

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2024, selanjutnya Renja Tahun 2024 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA)

dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Namun demikian berdasarkan kajian evaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan, masih terdapat beberapa kendala antara lain :

1. Permasalahan dan Kendala Utama yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja adalah sebagai berikut:
 - a. Fasilitas prasarana dan pelatihan masih belum lengkap
 - b. Kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta Penciptaan dan pengembangan perluasan kesempatan kerja belum optimal
 - c. Keberadaan BLK di Lamongan masih belum didukung tenaga pelatih (instruktur) sendiri sehingga masih bekerja sama dengan pihak ketiga (Instruktur LPKS) atau belum mempunyai Instruktur PNS.
 - d. Penyaluran eks peserta pelatihan di BLK ke perusahaan kurang optimal.
 - e. Masih belum maksimalnya LKS Bipartit Perusahaan dalam penyelesaian perselisihan antara pengusaha dan pekerja di perusahaan
2. Strategi Pemecahan Masalah untuk Tahun Mendatang.

Berdasarkan kajian evaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan, agar di tahun mendatang peningkatan kinerja lebih meningkat lagi capaiannya, guna lebih mendukung tercapainya tujuan dan sasaran, maka terhadap program-program yang telah ditetapkan dan dianggarkan khususnya terkait kebutuhan dasar masyarakat (sebagaimana RPJMD 2021 - 2026), disarankan perencanaannya lebih dimantapkan sehingga dapat terlaksana dengan baik dan diharapkan Pemerintah Kabupaten Lamongan lebih memperhatikan alokasi anggaran Ketenagakerjaan dalam rangka menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan mengurangi Kemiskinan.

Lamongan, 4 Agustus 2023

KEPALA DINASTENAGA KERJA
KABUPATEN LAMONGAN

